



Batasi Pertalite di Jogja-Bandung Mulai Juli

CARA PENDAFTARAN MYPERTAMINA

- Pendaftaran bisa di aplikasi MyPertamina atau website subsidiptepat.mypertamina.id.
- Siapkan KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya.
- Buka website subsidiptepat.mypertamina.id.
- Centang informasi "memahami persyaratan".
- Klik "daftar sekarang".
- Ikuti instruksi di website tersebut.
- Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat e-mail yang telah didaftarkan atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
- Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Keterangan
 Pendaftaran dibuka pada 1 Juli 2022. Uji coba dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DIJ.

Lokasi Implementasi Tahap I

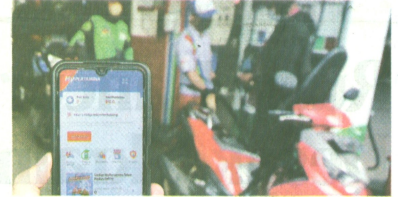
1. Kota Bukittinggi
2. Kab Agam
3. Kota Padang Panjang
4. Kab Tanah Datar
5. Kota Banjarmasin
6. Kota Bandung
7. Kota Tasikmalaya
8. Kab Ciamis
9. Kota Manado
10. Kota Jogjakarta
11. Kota Sukabumi



- Pelat Kuning-Angkutan Barang Tetap Berhak Dapatkan Solar Bersubsidi
- Pertamina Verifikasi Penerima Subsidi BBM hingga 15 Juli

JAKARTA – Pertamina terus mematangkan kebijakan pembelian BBM melalui aplikasi *MyPertamina*. Sesuai rencana, kebijakan tersebut bakal diterapkan secara bertahap mulai 1 Juli 2022. Pjs Corporate Secretary PT

Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irti Ginting menuturkan, untuk implementasi tahap I, ada sebelas daerah yang bakal menerapkan kebijakan tersebut (lihat grafis) ■ **Baca Batasi... Hal 11**



REKAM HISTORI: Warga menunjukkan aplikasi MyPertamina saat mengisi pertalite di salah satu SPBU di kawasan Kuningan, Jakarta, kemarin (28/6).

Batasi Pertalite di Jogja-Bandung Mulai Juli

Sambungan dari hal 1

Lantas, kepada siapa saja kebijakan itu diperuntukkan? Irti menjelaskan, khusus untuk pertalite, hingga saat ini belum ada kriteria khusus jenis kendaraan apa saja yang berhak. Sebab, kriteria peruntukan kendaraan masih menunggu finalisasi revisi Perpres 191 Tahun 2014.

"Selama proses pendaftaran dalam dua minggu, pembelian pertalite masih seperti biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi," ujarnya kepada *Jawa Pos* kemarin (28/6). *MyPertamina* adalah aplikasi layanan keuangan digital dari

Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi *LinkAja*. Mirip platform *e-money* lain seperti OVO, DANA, dan lainnya. Aplikasi itu digunakan untuk pembayaran BBM secara nontunai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina.

MyPertamina dapat di-download di Play Store (Android) dan App Store (iOS). Siapa pun boleh mendaftarkan kendaraannya melalui *MyPertamina*. Nanti Pertamina melakukan verifikasi dan pencocokan data lebih lanjut. Hasil verifikasi itu akan menentukan apakah yang bersangkutan berhak menerima BBM bersubsidi. Irti belum memastikan kapan

revisi Perpres 191 Tahun 2014 tersebut rampung. Karena itu, hingga saat ini pertalite masih disalurkan seperti biasa.

Sementara itu, pembelian solar masih sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. "Untuk solar sudah ada aturannya sesuai dengan kriteria pada Perpres 191 Tahun 2014," imbuhnya.

Dia mengimbau agar kendaraan industri dan masyarakat mampu membeli BBM non-subsidi. "Dengan demikian, solar subsidi bisa lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak yang membutuhkan," jelasnya. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra

Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan, pada periode 1 Juli nanti, ada empat kota/kabupaten di Jawa Barat yang melakukan uji coba transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.

"Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis akan menjadi daerah yang terlebih dahulu dilakukan pendataan melalui laman subsidiptepat.mypertamina.id untuk pendaftaran masyarakat," ujar Eko.

Dia menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BBM

subsidi harus mematuhi regulasi. Antara lain, memastikan penyaluran pertalite dan solar tepat sasaran dan tepat kuota. "Perlu diketahui bahwa di empat kota/kabupaten ini masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi *MyPertamina*. Sebab, registrasi bisa dilakukan melalui situs subsidiptepat.mypertamina.id tersebut," katanya.

Eko melanjutkan, jika kendaraan dan idehtitas masyarakat sudah terkonfirmasi dan terdaftar, sistem akan mengirim QR code unik yang dapat digunakan melalui aplikasi *MyPertamina*. Bisa juga di-print atau disimpan di galeri ponsel masing-masing. QR code tersebut nanti dicocokkan datanya di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi pertalite dan solar. "Jadi, pembayaran pun masih sama seperti transaksi biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai (*cash*), kartu kredit/debit, ataupun pilihan nontunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan *MyPertamina*," tambah Eko. Selanjutnya, uji coba di wi-

layah lain akan dilakukan secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta media sosial resmi @ptpertamina-patraniaga dan @mypertamina untuk informasi lebih lanjut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan, pihaknya belum menerima petunjuk teknis lebih jauh mengenai regulasi tersebut. Namun, pada dasarnya, Organda akan mendukung kebijakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pembelian BBM agar sesuai dengan target pasar. "Kami sudah sangat siap jika yang diperlukan adalah registrasi kendaraan atau pendataan armada. Sebab, sebelum ada skema seperti ini, kami sudah punya semua *database* armada kita," ujar Ateng kemarin (28/6).

Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mendukung penuh proyek percontohan penyaluran BBM subsidi di Indonesia.

Menurut dia, sudah seharusnya BBM subsidi tersalurkan ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tak memperlakukan kasus sistem tersebut akhirnya disamaratakan di semua wilayah. "Sekarang simpulnya ada di Pertamina. Apakah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan, aturan bahwa pertalite atau biosolar tak boleh dikonsumsi kendaraan mewah sudah disebut sejak lama. Namun, kenyataannya masih banyak penyelewengan di lapangan. Karena itu, pengusaha truk seperti dia mengaku khawatir jika ada pembatasan BBM. Selama pemerintah bisa menepati kuota truk angkutan barang sesuai kebijakan, Sundoro mengatakan bahwa pihaknya tak akan mengehul saat harus menggunakan aplikasi dalam pembelian BBM. "Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang melakukan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan," imbuhnya. (*dee/bil/agt/c6/oni*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005